



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PERTANAHAN KOMISI II DPR RI KE KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018-2019
TANGGAL 29 JANUARI 2019**

I. Pengantar

Dalam upaya melakukan kunjungan spesifik di Kabupaten Kulon Progo maka Komisi II DPR RI melakukan kunjungan masalah pertanahan ke Kabupaten Kulon Progo, adapun kunjungan tersebut untuk melihat sejauhmana program pemerintah terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), reforma agraria dan konflik pertanahan yang ada Kabupaten Kulon Progo. Sebagai sebuah sinergitas program PTSL, reforma agraria, maka kunjungan ini dilakukan di Kantor Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Pertemuan masalah pertanahan tersebut agar menjadikan persoalan-persoalan tanah dapat dikoordinasikan antara pemerintah daerah cq Kabupaten Kulon Progo dengan Kantor BPN Kabupaten Kulon Progo. Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Kulon Progo dalam rangka melihat dan meninjau langsung di lapangan terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Konflik Pertanahan. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Kunspek Komisi II DPR RI beserta rombongan 10 orang, Wakil Bupati Kulon Progo, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN DIY, Kepala Kantor Pertanahan Kulon Progo dan Wakil Kepala Kepolisian Resort Kulon Progo. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Bupati Kulon Progo Drs.H.Sutedjo, Kepala OPD terkait, bertempat di Ruang Menoreh Kantor Bupati Kulon Progo

II. Hasil Kunjungan Dengan Bupati Kulon Progo

Pertemuan diawali dengan sambutan oleh Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Drs. Sutedjo mewakili Bupati Kulon Progo. Selanjutnya acara diisi dengan sambutan Ketua Tim Kunspek Dr. Mardani, MEng dan perkenalan anggota tim Kunspek Komisi II DPR RI. Perkenalan tersebut dilanjutkan tanya jawab yang dipandu oleh Ketua Tim Kunspek.

Sambutan Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H Sutedjo.

Terimakasih kami ucapkan kepada rombongan Tim Komisi II DPR RI atas kedatangan di Kab. Kulon Progo semoga hal tersebut memberikan pencerahan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Sebagaimana sudah disampaikan kunjungan ini ingin melihat sejauhmana perkembangan PTSL, dan konflik pertanahan yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Secara geografis Kabupaten Kulon Progo berada di kawasan pantai Samudera Hindia dan dibatasi oleh perbukitan Menoreh. Kabupaten Kulon Progo beribukota di Wates, merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di Propinsi D.I. Yogyakarta yang terletak paling barat, dengan batas wilayah sebagai berikut sebelah barat : Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah; Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta; Utara : Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah; Selatan : Samudera Hindia. Jumlah penduduk sebanyak 437.441 orang. Tersebar dalam wilayah seluas 58.627,512 ha (586,28 km²), terdiri dari : 12 kecamatan; 87 desa dan 1 kelurahan; 917 Pedukuhan. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, kemudian perdagangan, industri olahan dll. Kulon Progo termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Dan Saat ini RAPBD Kulon Progo tahun 2019 sebesar 1,27 Trilyun. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 226 Milyar.

Meski keadaan dan kondis daerah Kulon Progo seperti di atas. Akan tetapi, Kulon Progo tetap berkeinginan menjadi kabupaten yang kokoh dan mandiri. Untuk itu kami memiliki jargon resmi yakni, bela dan beli kulon progo. Sehingga setelah berlangsung 6-7 tahun semboyan bela dan beli kulon progo tersebut telah menjadikan kabupaten ini memiliki komitmen untuk memajukan di kulon progo. Saat ini ada kain batik khas geblek dan ada makanan khas rempeng, tempe. Untuk memajukan perekonomian toko modern seperti alfa mart dan indomart diakusisi oleh koperasi rakyat dengan nama Tomira (toko milik rakyat). Toko-toko tersebut harus berada lebih dari radius 1 km dari pasar tradisional. Akuisis tersebut terjadi setelah pemkab tidak memperpanjang izin toko-toko tersebut kecuali mereka mau berganti menjadi toko modern yang bekerjasama dengan koperasi rakyat. Ketika para pemilik tersebut bersedia, maka mereka harus ikut menjual hasil produksi masyarakat kulon progo, misal beras, coklat, dan brown sugar.

Selanjutnya, untuk beras untuk rakyat miskin, kami sudah kerjasama dengan Bulog, dengan jalan Bulog membeli beras hasil pertanian warga Kulon Progo setelah itu kami salurkan ke masyarakat miskin. Setiap bulan Bulog membeli dari gapoktan yang ada.

Untuk program bedah rumah miskin kami melakukan kerjasama dengan dari Bazda, CSR dan sumbangan masyarakat atau komunitas bukan dari apbd kegiatan tersebut setiap minggu berputar dari satu desa ke desa yang lain.

Untuk masalah PTSL akan disampaikan oleh kepala Kantor Tanah Kulon Progo. Yang jelas kami mendukung PTSL sehingga kami mengadakan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat, membantu penyerahan sertipikat, membantu menentukan target dan lokasi PTSL.

Untuk persoalan sengketa lahan terkait New Yogyakarta International Airport (NYIA), kami telah memfasilitasi penyelesaian masalah tanah terdampak NYIA baik lahan pertanian, pemukiman. Adapun penyelesaian tersebut adalah menggunakan tanah kas desa sebanyak 288 KK, menggunakan tanah Kadipaten Paku Alaman (PA Ground) 50 unit, tanah Kas Desa 50 unit dan menggunakan tanah Sultan Ground (SG) 50 unit. kemudian untuk fasilitas umum sekolah SD, puskesmas, masjid, kuburan diganti dengan tanah kas desa Glagah.

Sambutan Ketua Tim Kunspek Dr. H. Mardani, M.Eng

Pada kesempatan ini kami memberikan apresiasi kepada Pemkab Kulon Progo karena telah berusaha memberikan perhatian kepada masyarakat. Semboyan Bela dan Beli Kulon Progo merupakan upaya yang patut di contoh untuk meningkatkan semangat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pada kesempatan kali ini kami ingin memperoleh informasi dari Pemkab dan Kantor Tanah Kulon Progo terkait program PTSL, reforma agraria, permasalahan tanah. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kulon Progo kemudian Kepala Kanwil DIY untuk memberikan penjelasan terkait persoalan-persoalan yang telah disebutkan tadi

Presentasi

Plt Kakan Pertanahan BPN Kulon Progo Slamet Suseno

Kantor BPN Kulon Progo dalam kesempatan itu memaparkan bahwa jumlah bidang tanah terdaftar di Kulon Progo hingga 2018 mencapai 352.889 bidang tanah dari perkiraan jumlah total 371.031 bidang di 12 kecamatan. Dari jumlah itu, 344.065 bidang tanah telah terdaftar sebagai hak milik. Persentase capaian pendaftaran saat ini mencapai 95,11 persen yang mengindikasikan hanya tersisa sedikit bidang yang belum didaftarkan atau masih dalam proses.

Dari sisi permasalahan pertanahan secara umum, dari 15 perkara yang diselesaikan melalui jalur pengadilan, sebagian besar masih dalam proses penyelesaian sengketa. Di antaranya menyangkut masalah waris, perjanjian, dan masalah alas hak.

Adapun untuk pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan NYIA, disebutkan bahwa ada 3.497 bidang tanah dengan luas total sekitar 587 hektare yang diakuisisi. Dari jumlah itu, kompensasi pembebasan atas 3.186 bidang dibayarkan langsung kepada pemilik tanah dan 311 bidang diselesaikan melalui konsinyasi di pengadilan negeri. Sebanyak 228 bidang di antaranya sudah selesai perkara konsinyasi erta sudah diambil dana kompensasinya. Tersisa 73 bidang yang uang ganti ruginya belum diambil. Selanjutnya untuk relokasi warga terdampak NYIA berdasar fasilitasi pemerintah daerah, ada 283 bidang tanah yang digunakan dan berasal dari tanah berstatus kas desa. Saat ini tengah dilakukan pengalihan sertifikat menjadi hak milik warga dan baru diselesaikan untuk 44 bidang saja. Sebanyak 229 bidang saat ini masih dalam proses karena berkasnya baru diterima BPN pada 14 Desember 2018 lalu. Sepuluh bidang lainnya saat ini masih diproses di Pemda.

Kakanwil BPN DIY Tri Wibisono, ST, MT

Untuk Provinsi DIY, mohon restu kami menyelesaikan program PTSL di Kulon Progo dapat mencapai 95%, karena pada tahun 2018 bidang tanah yang ada sudah 85,30 % sudah terdata PTSL. Oleh karena itu kita harapkan pada tahun 2020 sudah terdaftar semua. Dengan demikian pada tahun 2020 akan dilakukan peningkatan kualitas pendaftaran tanah yang sudah terdaftar.

Berbeda dengan provinsi lain, sesuai UU kekhasan DIY maka DIY punya kekhasan, salah satu kekhasan tersebut adalah tanah² di DIY yang dimiliki sulthan Jogja dan Kadipaten Paku Alam. Tanah tersebut berbentuk Sulthan Ground dan PA ground. Untuk masalah tersebut maka kami sudah kerjasama FH UGM untuk membuat naskah akademik untuk membahas kekhususan tanah di DIY dalam bentuk regulasi. Dengan kondisi tersebut maka reformasi agraria boleh dikatakan sangat minim.

Tanya jawab

1. Tabrani makmun

- a) Tadi sudah dijelaskan bahwa ada Perda untuk pengeluaran dana 150.000 untuk PTSL, tapi mengapa BPN juga keluar dana, jadi untuk apa karena kan sudah ada patok tanah, dll
- b) Dengan PTSL telah terdatanya bidang tanah di seluruh Kulon Progo sebesar 85,3%, dan dari jumlah tersebut yang telah menjadi sertipikat berapa?
- c) Dengan adanya PTSL apakah mengganggu Kegiatan pelayanan yang lain ?

2. Sirmadji

- a) Perbup no 2/ 2018 terkait beban yang diaptok sebesar 150.000. Sangat membantu PTSL.
- b) Bagaimana relokasi warga karena bandara?
- c) Bagaimana masalah pemberdayaan masyarakat pasca relokasi agar mereka mendapatkan keuntungan dari NYIA. Sehingga perlu membuat kawasan yang mendukung bandara sekaligus menguntungkan rakyat. Jangan sampai pembangunan justru mengundang urbanisasi yang akhirnya meminggirkan masyarakat setempat.
- d) Masalah sulthan Gound dan PA ground, dan pengakuan hukum atas surat kekancingan Sulthan Ground dan PA Ground sama dengan tanah yang hak milik lainnya, dan jangan sampai pembiayaan sertipikat tersebut membebani masyarakat.

3. Sutriyono

- a) Perlu penghargaan kepada para Kepala daerah yang telah memiliki kesuksesan dalam mengelola seperti program-program pro rakyat seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak wabup, seperti raskin dijadikan satu kaitan dengan ketahanan pangan
- b) Program PTSL telah banyak yang jadi korban, dengan adanya Perbup no 2 maka ini sesuatu yang bagus.

- c) Sulthan Ground dan PA Ground, masih menggunakan surat kekancingan, dari seluruh bidang yang masuk SG dan PAG. Perlu penjelasan bagaimana keterkaitan antara UU PA dan kekhususan DIY, apa saja yang ingin dibuat dalam naskah akademik.

4. Edy Kusumawijaya

- a) Kami memberikan apresiasi atas ide ekonomi kerakyatan seperti Tomira, bedah rumah miskin, pariwisata dan pembuatan air kemasan oleh PDAM. Saya juga mengapresiasi bahwa tahun 2020 semua bidang tanah sudah terdaftar PTSL.
- b) Di beberapa tempat PTSL dalam pensertipikat banyak pungli, terjadi di bawah spt kepala desa membentuk pokmas anggotanya rt rw, tomas, di sini tidak ada, tapi di daerah lain terjadi. PTSL akan berhasil kalau dibantu oleh instansi lain, seperti saber pungli.
- c) Bagaimana dengan perkembangan PP 43 2018, tentang keikutsertakan masyarakat dalam pemberantasan korupsi belum ada geloranya.
- d) Masalah bandara kl progo, apakah sudah diperhatikan setelah persoalan tata ruang dan wilayah RTRW , karena setelah ada bandara akan mengundang para pengembang di sekitar bandara. Sehingga di kemudian hari mungkin menjadi masalah
- e) Bagaimana perkembangan dana desa dan dana kelurahan, banyak kepala desa terindikasi korupsi. Kita perlu waspada dan hati-hati karena tahun 2019 ditargetkan akan turun 2, 5 milyar. Dan, bagaimana perkembangan di lapangan dengan akan diberikannya gaji dan tunjangan para perangkat terkecil setara dengan gol 2 A pns. Bila dana desa dan tunjangan dan gaji tersebut telah turun kita harapkan para aparat desa harus melakukan pelayanan yang baik dan jangan sampai muncul pungli terkait PTSL.
- f) Banyak sekali program pemerintah tidak didukung aparat desa, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran misalnya seseorang dapat bantuan karena masih kerabat lurah, kades, tapi justru yang benar-benar miskin tidak dapat, demikian juga dengan tunjangan beras dan telur dari pemerintah tidak tepat sasaran, seringkali hambatan muncul dari kemalasan dari kades, RT RW melaporkan ke atas persoalan yang ada. Untuk saya memberikan apresiasi bedah rumah oleh karena sebaiknya ditingkatkan dan diteruskan sekali

5. Sareh Wiyono

Masalah konsinyasi di pengadilan 73 bidang supaya segera dilakukan sebelum eksekusi sehingga dibelakang hari tidak terjadi masalah

6. Siti Sarwindah

- a) Saya memberikan apresiasi Kreatifitas pemimpin daerah seperti yang telah dijelaskan tadi, menjadikan PDAM, air PAM bisa menjadi air kemasan. Demikian juga mendorong Toko Tomira sebaiknya diterapkan di tempat lain, supaya perekonomian bukan hanya milik pemodal dan rakyat hanya obyek. Agar rakyat menjadi subyek maka perlu payung hukum sehingga rakyat terlindungi dari pemilik modal

- b) Dengan segala keterbatasan prasarana dan sarana BPN, tapi koq hasilnya maksimal, jadi dengan juru ukur jumlahnya 14 orang tentu sangat luar biasa
- c) mengapa K4 muncul ? mengapa berkas tidak lengkap?

7. Achamad Baidhowi

- a) Saya memberikan apresiasi PDAM, membuat air kemasan, agar dibuat regulasi sehingga tetap aman secara manajemen sehingga dapat untung. Di dapil saya di Pamekasan PDAM menjadi air kemasan tapi selalu rugi akhirnya selalu minta modal tambahan
- b) Perlu pemikiran jangka panjang dampak Bandara untuk itu perlu revisi RTRW agar ada penyesuaian sehingga tetap nyaman untuk masyarakat
- c) Terkait RUU pertanahan, dan kita juga sedang membuat UU masalah adat, apa usulan dari Kulon Progo terkait RUU tersebut

8. Mardani

Bagaimana pelaksanaan PTSL dengan kota atau kab lain di Prov DIY ?

Jawaban dan Tanggapan

Wakil Bupati Drs.Sutedjo

Terkait warga relokasi bandara, bahwa warga yang terdampak sudah dilakukan pendataan profesi masing2. Untuk itu kita juga meminta mereka ikut pelatihan wiausaha, Pemkab melakukan pelatihan baik tentang kebandarudaraan, pelatihan avsec, ground handling, pramugari, catering. Pelatihan tersebut terselenggara karena kreatifitas Kepala Dinas Tenaga Kerja membuat pelatihan dibiayai APBN dan dari PT. Angkasa Pura.

Ganti rugi lahan untuk NYIA Awalnya penolakan cukup keras, tapi setelah masyarakat memperoleh informasi bahwa appraisal harga tanah bagus dan menguntungkan. Akhirnya masyarakat pada mau mengambil ganti rugi tersebut dan tinggal 73 bidang yang belum diambil dan sekarang di konsiyasi pengadilan negeri.

Jalan negara, tidak boleh dibangun seluas 250 meter, sehingga kita bisa mengamankan tanah persawahan. Untuk mengamankan lahan pertanian Pemkab mencetak persawahanbaru pasca pembangunan bandara.

Untuk masalaha tunjangan telur dan beras, warga miskin tidak menerima uang raskin dan tunjangan telur, tapi mereka terima raskin dan telur yang mereka ambil di koperasi atau e warung. Yang menerima uang adalah e warung, berbasis IT.

Manajemen Tomira, kita tidak menolak pertokosn modern seperti alfa mart, indomart, tapi kami tidak ingin pasar tradisional tersingkir dan kalah. Maka kemudian ada Perda penataan pertokoan modern. Salah aturannya adalah toko modern jaraknya 1 km dari pasar tradsional. Ketika izin mereka habis, maka hanya ada dua pilihan tutup atau bersedia diakusisi oleh koperasi. Sehingga kita berhasil menjadikan mart tadi bekerjasama antara koperasi dengan manajemen mart masing

tapi terintegasi dengan koperasi rakyat dan kemudian ada space yang diisi oleh hasil UMKM dari Kulon Progo

Kita membangun bedah rumah non bugeter, yang berasal dari kepedulian sosial PNS di Pemkab Kulon Progo sebesar 8000 orang, maka setiap PNS membiayai untuk pendataan 4 kk miskin. Ketika Semuanya selesai, maka kita buat album kemiskinan kita undang tokoh dan kita minta penyanyi nasional Ebiet G Ade nyanyi sehingga pada tahun 2011 kita mendapat komitmen 500 juta terkumpul, dan dimulai bedah rumah dan uangnya langsung ke rumah miskin tersebut. setiap hari minggu saya dan pak bupati ikut bekerja. Dari situlah kemudian bermunculan dari komunitas-komunitas sosial yang ikut membantu bedah rumah miskin.

Untuk dana desa, sudah ada sebelum ada dana dari pemerintah pusat. Dan dana desa dari kab. Sejak tahun 1998. Sehingga bagi pemdes sudah biasa mengelola dana dari atas. Dan tidak banyak masalah.

Terkait pengajian perangkat desa setara PNS Gol 2 A, kita melihat perkembangannya karena dana diambil dari dana HDD. Dan regulasinya belum ada. Dan kita akui kadang pendataan data miskin yang terjadi manipulasi, untuk mengantisipasi hal tersebut kita melakukannya dengan rebug desa.

Ada proteksi untuk air kemasan PDAM airku, Pemkab memberikan edaran wajib menggunakan produk2 lokal agar laku. Airku menguasai 23 pangsa air di Kulon Progo

Plt Kantah BPN Kulon Progo Slamet Suseno

Untuk memperkuat program PTSL maka Pemkab Kulon Progo memiliki Perda 2 th 2018 yang mengatur adanya penggunaan dana RP 150 ribu. Dana itu digunakan untuk persiapan di level desa. Sementara di Kantah Kulon Progo tidak ada pungutan.

Relokasi NYIA tidak ada yang keleleran. Bahkan ada yang kelebihan bayar, jadi nanti akan proses selanjutnya akan tetapi secara umum relokasi bandara luar biasa dan saya sudah melihat sendiri. Untuk penataan di sekitar bandara biar bagus dan cantik, tergantung apakah masyarakat mau tidak ditata.

Untuk SG dan PAG, silahkan kalau masyarakat mau di sertipikat monggo.

Terdampak NYIA ada 4 desa seluas 160,9 Ha kena bandara karena merupakan PAG, sudah dibayarkan ke Paku Alaman, terkait permohonan pengembang kita serahkan dengan bupati.

Perizinan alih fungsi terkait bupati kita hanya memberi masukan teknis. Masalah 73 bidang yang dikonsinyai merupakan kewajiban PT. Angkasa Pura 1.

Untuk PTSL status K3, 1672 bidang yang tidak bisa ditindaklanjuti karena pemilik tidak ditempat.

Kakanwil BPN DIY Tri Wibisono, ST, MT

Anggaran untuk penyuluhan dan pengukuran dan penebitan sertipikat PTSL sudah cukup. Dan diperkuat oleh Perda yang memberikan back up tentang pendanaan, bahkan di Gunung Kidul inspektorat Pemkab telah ikut berperan untuk memberikan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.

SG dan PAG berasal dari pasal 2 UU PA, menjadi dasar asal-usul kehormatan pada Sulthan Yogya dan Sri Paku Alam yang telah bersedia mengintegrasikan kedalam NKRI. Dari persoalan tersebut kita membuat naskah akademik terkait keistimewaan tersebut, tentu NA itu akan menjadi landasan regulasi berikutnya.

Sebenarnya PTSL di Jogja tinggi. Yang paling rendah di Gn Kidul baru 60 %, agar kita dapat pengendalian tata ruang, karena kita punya peta bidang.

Tanah PAG 26% di Kulon Progo. Badan perda tata ruang sudah selesai kemas ATR/BPN pengendalian kawasan bandara.

Staf ahli Ekonomi Kemendagri ATR/BPN Sudarsono

Sebagai laporan PTSL, 2017, dari target 5 juta telah terlaksana sebanyak 5,4 juta,

PTSL 2018 dari target sebanyak 7 juta yang terlaksana sebanyak 9,3 juta. Dari seluruh PTSL tersebut statusnya adalah K1 6 juta, K2 dan K4 3,3 juta. Pada tahun 2019 targetnya 9 juta.

Terkait ganti rugi dulu memang banyak salah, karena proses pengadaan dan appraisal dilakukan Pemkab sehingga harga dibawah harga pasar. Sekarang ini untuk pendanaan tanah dan appraisal dilakukan pihak ketiga, dan itu lebih aman karena pemerintah tidak ikut campur dalam proses tersebut.

Kami menyambut baik perubahan Tata ruang terkait NYIA, yang mungkin jauh lebih penting adalah rencana tata ruang di bandara oleh Pemkab Kulon Progo, sehingga menjadi rujukan kita semua bagaimana ke depan perkembangan bandara NYIA.

III. Kesimpulan

1. Perlu tata ruang detail bandara NYIA sehingga dapat mengoptimalkan kegunaannya bagi masyarakat sekitar Bandara.
2. Terkait pembangunan NYIA perlu ada optimisasi hasil untuk warga Kulon Progo dan Yogyakarta.
3. Perlu adanya peningkatan tunjangan kinerja untuk aparat BPN karena kinerjanya bagus.